

BAB V

PEBUTUP

5.1 Kesimpulan

Upaya pencegahan stunting di Kota Batam menerapkan pendekatan Collaborative Governance, yang menekankan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan program yang lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Keberhasilan program ini bergantung pada koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan serta dukungan kebijakan yang jelas. Regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menjadi dasar hukum yang memperkuat upaya percepatan penurunan stunting.

Sektor swasta turut berkontribusi melalui berbagai program, seperti Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) yang didukung oleh BNI, PT Thiess, dan Apindo Kepri. Program ini memberikan bantuan pangan bergizi kepada anak-anak berisiko stunting. Selain itu, Rumah Asuh Terintegrasi Generasi Emas 2045 menjadi solusi bagi anak-anak pekerja yang membutuhkan pengasuhan serta pemenuhan gizi yang lebih baik. Di tingkat masyarakat, kader Posyandu berperan penting dalam mendampingi keluarga yang memiliki anak berisiko stunting. Mereka membantu memantau status gizi anak, memberikan penyuluhan tentang pola asuh yang sehat, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan layanan kesehatan. Namun, masih ada tantangan dalam pelaksanaan program ini, seperti penyebaran informasi yang belum merata, pemahaman masyarakat yang masih

terbatas, serta minimnya dukungan anggaran bagi kader dalam menjalankan tugasnya.

Keberhasilan penerapan Collaborative Governance dalam pencegahan stunting di Kota Batam dipengaruhi oleh beberapa aspek utama, yaitu:

1. Aspek Budaya

Nilai dan kebiasaan masyarakat mempengaruhi cara mereka menerima dan menjalankan program pencegahan stunting. Masih ditemukan pola asuh yang kurang tepat akibat pemahaman gizi yang minim. Oleh karena itu, pendekatan berbasis budaya yang melibatkan tokoh masyarakat dan kader Posyandu sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Aspek Institusi

Regulasi dan struktur organisasi sudah mendukung implementasi program, tetapi masih ada kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait keterbatasan anggaran dan fasilitas dasar, seperti akses air bersih dan sanitasi di beberapa wilayah.

3. Aspek Politik

Dinamika politik dan pembagian kewenangan mempengaruhi efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan. Ego sektoral dan perbedaan prioritas antar instansi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi agar program dapat berjalan lebih optimal.

Secara keseluruhan, penerapan Collaborative Governance dalam pencegahan stunting di Kota Batam telah menunjukkan hasil yang positif dengan meningkatnya

kesadaran masyarakat serta keterlibatan sektor swasta dalam berbagai program. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan pemahaman masyarakat, minimnya anggaran, serta hambatan dalam koordinasi antar pihak yang perlu segera diatasi agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

5.1 Saran

Dalam meningkatkan efektivitas Collaborative Governance dalam pencegahan stunting di Kota Batam, diperlukan beberapa langkah strategis yang mencakup aspek edukasi, koordinasi, infrastruktur, serta kebijakan.

1. Peningkatan literasi dan sosialisasi harus menjadi prioritas utama. Edukasi mengenai gizi dan pola asuh yang tepat perlu disampaikan dengan pendekatan berbasis budaya lokal agar lebih mudah dipahami masyarakat. Pemanfaatan media digital, seperti media sosial dan aplikasi kesehatan, serta kerja sama dengan media massa juga dapat memperluas jangkauan informasi sehingga kesadaran masyarakat meningkat secara merata.
2. Penguatan kolaborasi antar sektor perlu terus dioptimalkan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus memiliki koordinasi yang lebih terstruktur melalui forum komunikasi lintas instansi. Sektor swasta dapat berperan lebih aktif dalam program seperti Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) dan Rumah Asuh Terintegrasi, tidak hanya melalui bantuan finansial tetapi juga dengan inovasi dalam edukasi dan penyediaan fasilitas kesehatan.
3. Optimalisasi anggaran dan infrastruktur menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi

anggaran untuk mendukung kader Posyandu yang menjadi ujung tombak pendampingan keluarga berisiko stunting. Selain itu, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, terutama di wilayah hinterland, harus menjadi perhatian utama, mengingat faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap status gizi anak. Keterlibatan sektor swasta melalui program **CSR** juga dapat dimaksimalkan untuk membantu perbaikan infrastruktur kesehatan.

4. Perkuat kapasitas kader Posyandu sangat diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal. Pelatihan berkelanjutan harus diberikan agar kader memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mendampingi keluarga serta mampu menyampaikan edukasi dengan cara yang lebih mudah dipahami masyarakat. Insentif bagi kader juga perlu ditingkatkan untuk menjaga motivasi dan keberlanjutan peran mereka di lapangan.

Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan program pencegahan stunting di Kota Batam dapat lebih optimal, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan anak-anak serta generasi mendatang.